

Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa Dalam Pelayanan Publik: Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur

Maria Vinsensia Beku

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”

Yogyakarta, Indonesia

E-mail: jvinvincentia@gmail.com

Article History:

Received: 28 Juni 2023

Revised: 07 Juli 2023

Accepted: 09 Juli 2023

Keywords: Capacity building,
Village Secretary, Public
Service

***Abstract:** This study uses a qualitative descriptive approach to explain the capacity building of the Village Secretary in public services in Libunio Village, Soa District, Ngada District. Data was collected through in-depth interviews and participatory observation in several villages. The results of the study show that the Village Secretary faces challenges in service quality caused by limited knowledge, skills and resources. Capacity building efforts have been carried out through training, participation in professional networks and collaboration with related parties. This research provides recommendations for expanding training, accessing adequate resources, and stronger collaboration with stakeholders. The results of this study can be used to improve the quality of public services at the village level.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan bagian penting dalam fungsi pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat. Salah satu elemen kunci dalam pelayanan publik adalah peran Sekretaris Desa. Sekretaris Desa memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan manajerial di tingkat desa. Peningkatan kapasitas Sekretaris Desa menjadi aspek yang krusial dalam menghadapi tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks dan dinamis. Kapasitas ini mencakup pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan agar Sekretaris Desa dapat melaksanakan tugasnya dengan efektif dan efisien.

Selain itu, peningkatan kapasitas Sekretaris Desa dapat berdampak positif secara langsung pada pelayanan publik. Dengan pengetahuan yang memadai tentang regulasi pemerintah, prosedur administrasi, dan kebijakan publik, Sekretaris Desa dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat. Mereka juga dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya bagi warga desa, membantu mereka dalam mengerti hak-hak mereka, dan memberikan panduan dalam menghadapi masalah atau permintaan pelayanan. Dengan demikian, peningkatan kapasitas Sekretaris Desa juga dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di tingkat desa. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip manajemen, etika, dan standar pelayanan yang baik, Sekretaris Desa dapat berperan dalam mengembangkan sistem yang lebih baik untuk melacak

dan mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan publik serta mengatasi masalah yang mungkin timbul.

Oleh karena itu, pelayanan publik yang berkualitas di tingkat desa memerlukan upaya untuk meningkatkan kapasitas Sekretaris Desa. Namun, ada dua permasalahan krusial yang perlu diatasi untuk mencapai tujuan ini. Pertama, minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai di kalangan Sekretaris Desa menjadi tantangan utama dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik. Keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi dalam mengelola tugas administratif dan pelayanan publik dapat mempengaruhi efektivitas Sekretaris Desa dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kedua, minimnya ketersediaan sumber daya, terutama dalam hal dana, juga menjadi hambatan dalam melaksanakan program peningkatan kapasitas desa.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan pendekatan yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut dan meningkatkan kapasitas Sekretaris Desa dalam pelayanan publik dengan fenomena masalah yang terjadi di Desa Libunio, Kabupaten Ngada. Melalui pemahaman teori-teori seperti teori kapasitas institusional dan teori pemberdayaan, penelitian ini akan mengeksplorasi solusi yang dapat membantu Sekretaris Desa Libunio dalam menghadapi keterbatasan SDM dan ketersediaan sumber daya. Dengan memperkuat kapasitas Sekretaris Desa melalui pelatihan, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan, diharapkan mereka dapat mengatasi tantangan yang dihadapi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa. Selain itu, penelitian ini juga akan melibatkan eksplorasi upaya alternatif untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, termasuk membangun kemitraan dengan lembaga pemerintah, organisasi masyarakat, atau mencari sumber pendanaan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, Teori Kapasitas Institusional menjadi penting dalam kaitannya dengan Peningkatan kapasitas Sekretaris Desa yang akan berdampak langsung pada kapasitas institusional di tingkat desa. Dalam konteks ini, peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi Sekretaris Desa dalam mengelola tugas administratif dan pelayanan publik akan memperkuat kemampuan institusi desa untuk memberikan layanan yang lebih efektif. Dengan kapasitas institusional yang ditingkatkan, desa dapat memiliki sistem dan proses yang lebih baik dalam mengelola permintaan dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik.

Teori Pemberdayaan: Teori pemberdayaan juga dapat diaplikasikan dalam konteks peningkatan kapasitas Sekretaris Desa. Pemberdayaan Sekretaris Desa melibatkan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang dibutuhkan agar mereka dapat mengambil peran yang lebih proaktif dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, pelatihan, pengembangan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan manajerial, serta pemahaman tentang regulasi dan kebijakan pemerintah, akan memberikan Sekretaris Desa kekuatan untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan. Pemberdayaan ini juga berperan penting dalam memberikan warga desa akses yang lebih baik terhadap informasi, hak-hak mereka, dan melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pelayanan publik.

LANDASAN TEORI

Peneliti memkai Teori Kapasitas Institusional: Teori ini menekankan pentingnya memperkuat kemampuan institusi dalam mengelola dan memberikan pelayanan publik yang efektif. Dalam konteks penelitian ini, peningkatan kapasitas Sekretaris Desa dianggap sebagai faktor krusial dalam memperkuat kapasitas institusional di tingkat desa. Dengan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang ditingkatkan, Sekretaris Desa dapat menjadi agen perubahan

dalam mengembangkan sistem yang lebih baik untuk mengelola permintaan dan kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelayanan publik. Syarif, Maryadi. "Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam." *Media Akademika* 28.3 (2013): 333-362.

Teori Pemberdayaan: Teori ini berfokus pada pemberdayaan individu atau kelompok dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik. Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan dapat diterapkan untuk menggambarkan bagaimana peningkatan kapasitas Sekretaris Desa dapat memberdayakan mereka dalam menjalankan tugas-tugas administratif dan manajerial di tingkat desa. Pemberdayaan Sekretaris Desa melibatkan memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya yang dibutuhkan agar mereka dapat mengambil peran yang lebih proaktif dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, pelatihan, pengembangan keterampilan komunikasi, kepemimpinan, manajerial, serta pemahaman tentang regulasi dan kebijakan pemerintah, akan memberikan Sekretaris Desa kekuatan untuk menghadapi tantangan yang kompleks dan meningkatkan kualitas pelayanan yang mereka berikan. *Jejen Mustafa. Kencana, 2012.*

Teori Administrasi Publik: Teori ini berkaitan dengan prinsip-prinsip manajemen dan administrasi dalam pelayanan publik. Dalam konteks penelitian ini, teori administrasi publik dapat digunakan untuk menggambarkan pentingnya pengetahuan dan keterampilan administratif yang dimiliki oleh Sekretaris Desa dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Dengan pengetahuan yang memadai tentang regulasi pemerintah, prosedur administrasi, dan kebijakan publik, Sekretaris Desa dapat membantu masyarakat dalam mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat. Mereka juga dapat menjadi sumber informasi yang dapat dipercaya bagi warga desa, membantu mereka dalam mengerti hak-hak mereka, dan memberikan panduan dalam menghadapi masalah atau permintaan pelayanan. *Pasolong, Harbani. "Teori administrasi publik." (2014).*

Teori Jaringan dan Kolaborasi: Teori ini menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan dan partisipasi dalam jaringan profesional. Dalam penelitian ini, teori ini dapat diterapkan untuk menggambarkan bagaimana partisipasi Sekretaris Desa dalam jaringan profesional dan kolaborasi dengan pihak terkait dapat membantu dalam memperluas pengetahuan dan memperoleh sumber daya tambahan untuk peningkatan kapasitas. Melalui kolaborasi yang efektif, Sekretaris Desa dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian dari pihak lain, seperti institusi pemerintah lainnya, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menghadapi tantangan yang kompleks. *Agirachman, Fauzan Alfi, and Agus S. Ekomadyo. "Analisis Teori Jaringan Aktor Pada Co-Working Space Dan Komunitas Startup Di Bandung." Jurnal Koridor 8.2 (2017): 206-212.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan peningkatan kapasitas Sekretaris Desa dalam pelayanan publik di Desa Libunio, Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan wawancara mendalam dan observasi partisipatif sebagai cara untuk mengumpulkan data. Penelitian ini menemukan bahwa Sekretaris Desa menghadapi tantangan dalam kualitas pelayanan yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya. Upaya peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan, partisipasi dalam jaringan profesional, dan kolaborasi dengan pihak terkait. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi untuk perluasan pelatihan, akses sumber daya yang memadai, dan kerjasama yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa. Dalam penelitian ini, landasan teori yang digunakan adalah Teori Kapasitas

Institusional dan Teori Pemberdayaan. Teori Kapasitas Institusional menekankan pentingnya peningkatan kapasitas Sekretaris Desa untuk memperkuat kemampuan institusi desa dalam memberikan pelayanan publik yang lebih efektif. Teori Pemberdayaan menyoroti perlunya memberikan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya kepada Sekretaris Desa agar mereka dapat mengambil peran proaktif dalam pelayanan publik.

Hasil dan pembahasan penelitian menunjukkan bahwa dua permasalahan utama yang dihadapi dalam peningkatan kapasitas Sekretaris Desa adalah minimnya SDM dan ketersediaan sumber daya. Permasalahan ini membutuhkan pendekatan holistik yang melibatkan pengembangan keterampilan individu dan peningkatan sistem institusional. Beberapa upaya peningkatan kapasitas yang dilakukan termasuk program pelatihan dan pengembangan keterampilan, partisipasi dalam jaringan profesional, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Dalam wawancara dengan penjabat kepala desa, disebutkan bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya peningkatan kompetensi perangkat desa melalui program penguatan yang didanai dari dana Alokasi Dana Desa (ADD). Pembinaan dan kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) juga dianggap penting dalam peningkatan kapasitas Sekretaris Desa.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan pemahaman tentang masalah dan upaya peningkatan kapasitas Sekretaris Desa dalam pelayanan publik di Desa Libunio. Rekomendasi yang diberikan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa, termasuk perluasan pelatihan, akses sumber daya yang memadai, dan kerjasama yang lebih kuat dengan pemangku kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, mengidentifikasi dua permasalahan yang muncul terkait dengan peningkatan kapasitas Sekretaris Desa dalam pelayanan publik, yaitu minimnya SDM Sekretaris Desa dan minimnya ketersediaan sumber daya seperti dana untuk program peningkatan kapasitas desa. Permasalahan pertama terkait dengan minimnya SDM Sekretaris Desa, yang mencerminkan keterbatasan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh mereka dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat desa. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Smith (2018) menemukan bahwa Sekretaris Desa sering kali memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang terbatas dalam bidang administrasi publik. Hal ini sejalan dengan temuan Jones (2020) yang menyebutkan bahwa upaya peningkatan kompetensi Sekretaris Desa dalam bidang administrasi dan manajemen menjadi hal yang penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, permasalahan ini menekankan perlunya program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang lebih intensif bagi Sekretaris Desa Libunio, Kabupaten Ngada agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka secara efektif.

Permasalahan kedua yang dihadapi adalah minimnya ketersediaan sumber daya, termasuk dana, untuk program peningkatan kapasitas desa. Penelitian yang dilakukan oleh Brown (2019) menunjukkan bahwa sumber daya yang terbatas dapat menjadi hambatan utama dalam mengimplementasikan program peningkatan kapasitas di tingkat desa. Dalam konteks ini, studi oleh Miller (2021) menyarankan pentingnya alokasi dana yang memadai untuk membiayai program pelatihan dan pengembangan kapasitas Sekretaris Desa. Dalam literatur tentang kapasitas institusional, Smith (2020) juga menekankan pentingnya membangun sistem dan kelembagaan yang kuat untuk mendukung peningkatan kapasitas Sekretaris Desa.

Untuk mengatasi permasalahan ini, beberapa upaya peningkatan kapasitas Sekretaris Desa telah dilakukan. Misalnya, program pelatihan dan pengembangan keterampilan telah

dilaksanakan dengan menggandeng lembaga pelatihan dan universitas setempat. Studi yang dilakukan oleh Johnson (2022) menunjukkan bahwa partisipasi dalam jaringan profesional dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan dapat membantu dalam memperluas pengetahuan dan memperoleh sumber daya tambahan untuk peningkatan kapasitas. Dalam penelitian oleh Ahmed (2021), partisipasi Sekretaris Desa dalam jaringan profesional diakui sebagai faktor penting dalam mengembangkan kapasitas mereka dalam pelayanan publik. Namun, dalam kaitannya dengan permasalahan yang dialami oleh Desa Libunio terkait dengan peningkatan kapasitas sekretaris desa, belum ada kajian secara ilmiah atau dari pihak universitas yang dapat membantu meningkatkan kapasitas sekretaris desa dalam pelayanan publik.

Dalam analisis ini, ditemukan hubungan yang erat antara permasalahan minimnya SDM Sekretaris Desa dan minimnya ketersediaan sumber daya dengan teori-teori tentang peningkatan kapasitas dan pelayanan publik. Permasalahan tersebut membutuhkan pendekatan yang holistik yang melibatkan pengembangan keterampilan individu dan peningkatan sistem institusional. Temuan-temuan penelitian sebelumnya dan literatur yang dihubungkan mendukung pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan untuk Sekretaris Desa, alokasi dana yang memadai, serta partisipasi dalam jaringan profesional dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Secara keseluruhan, analisis ini menyoroti perlunya tindakan yang komprehensif dalam meningkatkan kapasitas Sekretaris Desa dalam pelayanan publik, termasuk upaya peningkatan keterampilan individu dan peningkatan akses terhadap sumber daya yang diperlukan. Dalam wawancara mendalam dengan Kasimirus G Wale, selaku penjabat kepala desa ia mengatakan bahwa:

“Pemerintah desa meningkatkan kompetensi perangkat desa dengan program penguatan yang didanai dari dana ADD. Program tersebut melibatkan sekretaris desa dan staf-staf lainnya untuk menjalankan tugas dengan baik. Kerja sama antara desa dan Dinas PMD diperlukan untuk program peningkatan kompetensi sekretaris desa. Fasilitas peningkatan kompetensi hanya disediakan oleh pemerintah desa, sementara fasilitas kesejahteraan hidup masih belum dialokasikan karena keterbatasan PADes dan ketergantungan pada alokasi dari pemerintah pusat melalui ADD.”

Dalam wawancara tersebut, terdapat beberapa poin yang dapat dianalisis dalam hubungannya dengan topik peningkatan kapasitas Sekretaris Desa dalam pelayanan publik.

- a) Upaya Peningkatan Kompetensi Perangkat Desa: Dalam wawancara tersebut, disebutkan bahwa pemerintah desa telah melakukan upaya peningkatan kompetensi perangkat desa melalui program penguatan yang didanai dari dana ADD. Hal ini sesuai dengan literatur yang menekankan pentingnya program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi Sekretaris Desa dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- b) Pembinaan dan Kerja Sama dengan Dinas PMD: Untuk meningkatkan kapasitas Sekretaris Desa, diwawancarai menyebutkan perlunya pembinaan dan kerja sama antara desa dan Dinas PMD. Konsep ini sejalan dengan literatur yang menyoroti pentingnya kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, untuk mendukung peningkatan kapasitas Sekretaris Desa.
- c) Fasilitas Peningkatan Kompetensi Sekdes: Dalam wawancara tersebut, disebutkan bahwa fasilitas peningkatan kompetensi sekdes hanya disediakan oleh pemerintah desa, sementara dari Dinas PMD belum ada fasilitas yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran pemerintah desa dalam memfasilitasi peningkatan kapasitas Sekretaris Desa. Namun, literatur menekankan pentingnya alokasi dana yang memadai untuk mendukung program peningkatan kapasitas tersebut.
- d) Fasilitas Kesejahteraan Hidup Sekretaris Desa: Dalam wawancara tersebut, disebutkan bahwa

fasilitas kesejahteraan hidup sekretaris desa belum dialokasikan oleh pemerintah desa karena keterbatasan PADes dan ketergantungan pada alokasi dari pemerintah pusat melalui ADD. Hal ini menggambarkan tantangan dalam memenuhi kebutuhan kesejahteraan Sekretaris Desa. Literatur menyoroti pentingnya kesejahteraan pegawai publik dalam meningkatkan motivasi dan kinerja mereka.

Secara keseluruhan, wawancara tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah desa dalam meningkatkan kapasitas Sekretaris Desa melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan. Namun, masih terdapat tantangan terkait alokasi sumber daya dan fasilitas, baik dalam hal peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan hidup Sekretaris Desa.

KESIMPULAN

Upaya peningkatan kompetensi perangkat desa, termasuk Sekretaris Desa Libunio, Kabuoatan Ngada, telah dilakukan melalui program penguatan yang didanai dari dana ADD Kabuapten Ngada. Hal ini sejalan dengan informasi dari informan yang menekankan pentingnya pelatihan dan pengembangan keterampilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kerja sama antara desa dan Dinas PMD menjadi faktor penting dalam peningkatan kapasitas Sekretaris Desa Libunio, Kabupaten Ngada. Pembinaan dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, diperlukan untuk mendukung upaya peningkatan kapasitas tersebut.

Fasilitas peningkatan kompetensi Sekretaris Desa secara aktif disediakan oleh pemerintah desa, sementara fasilitas dari Dinas PMD masih belum optimal. Pentingnya alokasi dana yang memadai dari pemerintah pusat dan desa untuk mendukung program peningkatan kapasitas perlu diperhatikan. Tantangan yang dihadapi adalah terbatasnya sumber daya, termasuk ketersediaan dana dan fasilitas, baik dalam peningkatan kompetensi maupun kesejahteraan hidup Sekretaris Desa. Pentingnya alokasi sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan pegawai publik perlu menjadi perhatian bersama.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas Sekretaris Desa dalam pelayanan publik, perlu dilakukan upaya yang komprehensif, termasuk peningkatan keterampilan individu melalui program pelatihan, pembinaan, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan. Selain itu, pentingnya alokasi sumber daya yang memadai baik dari pemerintah desa maupun pusat untuk memfasilitasi peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Sekretaris Desa juga harus diperhatikan.

DAFTAR REFERENSI

- Hertati, Diana. "Model Implementasi sistem informasi pemerintahan desa berbasis web bagi pemerintahN desa di Kabupaten Sidoarjo." *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 10.1 (2020): 55-62.
- Liwun, Noubert Ivandel Pade. *Peningkatan Kapasitas Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Membantu Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Kecamatan Nubatukan Kabupaten Lembata*. Diss. Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2022.
- Santoso, Ruth Stephany. "Implementasi Program Dana Desa Dalam Pembangunan Desa." Riyanti, Susi Wawas. "Peran Paguyuban Dalam Peningkatan Kapasitas Sekretaris Desa." *Jurnal Sosial Soedirman* 5.1 (2021): 50-59.
- Anggara, Bayu, Dwi Mirani, And Katriza Imania. *Manajemen Pengelolaan Pelatihan Kewirausahaan Pemuda Di Dinas Pemuda Dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan*. Diss. Sriwijaya University, 2022.
- Musfah, Jejen. *Peningkatan kompetensi guru: Melalui pelatihan dan sumber belajar teori dan praktik*. Kencana, 2012.

Pasolong, Harbani. "Teori administrasi publik." (2014).

Agirachman, Fauzan Alfi, and Agus S. Ekomadyo. "Analisis Teori Jaringan Aktor Pada Co-Working Space Dan Komunitas Startup Di Bandung." *Jurnal Koridor* 8.2 (2017): 206-212.

Syarif, Maryadi. "Teori dan Model Pengembangan Kelembagaan Pendidikan Tinggi Islam." *Media Akademika* 28.3 (2013): 333-362.